



LINGKAR EKONOMIKA

Available at: <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/jle/index>

Blue Economy: Solusi Membangun Kembali Perekonomian “Blue Recovery” Pasca Pandemi Covid-19 untuk Sustainable Welfare

Ajeng Faizah Nijma Ilma^{1*}, Dedi Supriadi¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

*Corresponding Author: ajengfaizah.af@gmail.com

Article Information

History of Article:

Received: March 25, 2022

Accepted: June 12, 2022

Published: July 28, 2022

Keywords:

blue economy, Covid-19, ocean ecosystem,, sustainable welfare, blue recovery, marine sector

Abstract

Indonesia has great potential to carry out a recovery based on maritime sector after the Covid-19 pandemic (Blue Recovery) and encourage the transition from extractive efforts to the creation of added value and productivity. The blue economy is also a space to create new innovations and creativity, both in existing and developing sectors, so that the blue economy can be a driver of inclusive welfare improvement. Several issues were raised as an alternative solution to the economic downturn during the Covid-19 pandemic in Indonesia. The blue economy is expected to bring sustainable prosperity to coastal communities in Indonesia as well as people who depend on the marine sector for their livelihoods. The blue economy is the main issue of environmentally sound marine resources to support economic growth, sustainable prosperity and livelihood stability as well as the preservation of marine ecosystems with clean, no waste, sustainable use of ocean resources for economic growth, improved livelihoods, and jobs while preserving the health of ocean ecosystem

PENDAHULUAN

Dewasa ini, gagasan pengembangan Indonesia sebagai negara maritim semakin santer digaungkan sebagai salah satu bentuk pengembangan dari konsepsi ketahanan nasional. Pengembangan konsepsi Indonesia sebagai negara maritim sejalan dengan upaya peningkatan kemampuan bangsa kita untuk menjadi bangsa yang mandiri dalam hal teknologi kelautan bagi kesejahteraan bangsa dan negara dengan tetap berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional sebagai landasan konsepsionalnya. Parameter konteks kekuatan laut yang tangguh mengarah pada 3 elemen operasional yaitu unsur kekuatan militer, penggerak roda perekonomian berbasis kelautan dan pelabuhan. Berdasarkan pada 3 konsep ini, tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk dapat berkembang menjadi negara maritim yang tangguh dengan garis pantai Indonesia yang mencapai 104.000 km, luas wilayah laut mencapai 284.210,9 km² laut teritorial. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan karunia sumber daya kelautan yang besar termasuk didalamnya keanekaragaman hayati yang luar biasa.

Indonesia memiliki kekayaan dalam bidang kelautan dan perikanan yang layak dibanggakan. Negara kepulauan ini ada di urutan kedua sebagai negara penghasil ikan terbesar dunia setelah Tiongkok. Laut Indonesia adalah bagian terbesar Segitiga Terumbu Karang yang menjadi habitat 76 persen dari seluruh spesies terumbu karang dan 37 persen dari seluruh spesies ikan terumbu karang dunia. Terdapat 2,8 juta rumah tangga yang terlibat langsung dalam industri maritim Indonesia. Tidak mengherankan bahwa 54 persen dari sumber protein hewani masyarakat Indonesia berasal dari ikan dan makanan laut. Sepuluh persen komoditas perikanan dunia diekspor oleh Indonesia. Angka ini akan terus bertambah seiring meningkatnya permintaan global untuk makanan laut. Nilai sektor perikanan Indonesia adalah sebesar 29,6 miliar dolar AS, setara dengan 2,6 persen PDB Indonesia. Sektor ini juga berkontribusi terhadap sektor pariwisata dan secara nyata ikut mendukung pelestarian lingkungan.

Manfaat dari pengembangan ekonomi biru adalah kelestarian keanekaragaman hayati laut dan ekosistem laut dan pesisir, serta mata pencaharian yang berkelanjutan, utamanya bagi masyarakat pesisir. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjalankan pemulihan biru pasca pandemi *Covid-19 (Blue Recovery)* dan mendorong transisi dari upaya ekstraktif menjadi penciptaan nilai tambah dan produktivitas. Ekonomi biru juga merupakan ruang untuk menciptakan inovasi dan kreativitas baru, baik pada sektor yang sudah ada maupun yang sedang berkembang, sehingga ekonomi biru dapat menjadi penggerak peningkatan kesejahteraan yang inklusif. Transisi Indonesia ke ekonomi biru juga diharapkan menjadi model pengembangan industri berbasis kelautan yang berkelanjutan yang mengurangi ketergantungan ekonomi pada sektor ekstraktif, sehingga menghasilkan kesejahteraan berkelanjutan.

Dalam rangka pemulihan dan transformasi ekonomi pasca pandemi *Covid-19*, Indonesia perlu memiliki pendekatan baru dan mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan. *Blue Economy* adalah salah satu jawabannya, dengan potensi ekonomi yang perlu dioptimalkan, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 65 persen total luas negara Indonesia berupa laut. Terdapat peluang untuk menyelaraskan upaya pemulihan ekonomi jangka pendek pasca *Covid-19* dengan kebutuhan jangka panjang di sektor kelautan. Sistem pengelolaan kunci seperti rencana tata ruang wilayah dan rencana pengelolaan perikanan bisa diuji dan diterapkan saat ini. Konteks tersebut juga memberikan pemerintah waktu untuk mengatasi berbagai tantangan. Paket pemulihan ekonomi bisa dikembangkan untuk membuka lapangan pekerjaan seraya memperkuat ketahanan pesisir melalui aktivitas restorasi pesisir dan laut yang bersifat padat karya.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah fenomenologi hukum normatif atau kualitatif deskriptif dengan menekankan analisa studi pustaka dan prosedur pengumpulan data bersumber pada bahan sekunder yang bersifat deskriptif. Penelitian fenomenologi dimulai dari memperhatikan dan menelaah fokus fenomena yang akan diteliti, melihat berbagai aspek subjektif dari perilaku objek. Kemudian melakukan penggalian data berupa bagaimana pemaknaan objek dalam memberikan arti terhadap fenomena yang terkait. Penggalian data dilakukan dengan wawancara yang mendalam kepada objek atau informan di dalam penelitian, serta dengan melakukan observasi secara langsung mengenai bagaimana objek penelitian menginterpretasikan pengalamannya kepada orang lain.

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik karena jenis penelitian ini menghasilkan penemuan yang sifatnya narasi atau gambaran logika sehingga tidak dapat difokuskan pada angka-angka atau dengan metode kuantitatif. Data yang diperoleh dan diolah adalah data yang bersumber dari kajian pustaka atau studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur, artikel, serta situs-situs internet yang menghasilkan suatu rincian dari fenomena yang diteliti dalam tulisan ini. Kemudian analisis data dimulai dari proses menelaah informasi yang telah diperoleh melalui literatur yang tersedia, maka setelah dibaca, ditelaah, dan dipelajari secara menyeluruh, data tersebut dirangkum dalam bentuk kategori sesuai dengan jumlah permasalahan dan aspek penyelesaian masalah dalam penyusunan tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep dan Urgensi Ekonomi Biru (*Blue Economy*)

Upaya pemerintah dalam menangani, mengatasi, dan mengakhiri kejadian yang berkaitan dengan penyebaran virus *corona*, yaitu menetapkan pembatasan kegiatan di luar rumah, melarang berburuk dan berkerubung, melakukan pekerjaan dari rumah, dan sebagainya. Berkurangnya kegiatan masyarakat tentu berpengaruh terhadap menurunnya aktivitas atau kegiatan masyarakat sehari-hari seperti kegiatan ekonomi, sosial dan keagamaan. Ekonomi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap individu. Dengan adanya ekonomi yang selalu berkaitan dalam memberikan peluang untuk melengkapi kebutuhan dasar individu. Seiring dengan diberlakukannya pembatasan dalam ruang gerak bermasyarakat berimbas pada beberapa sektor kehidupan masyarakat.

Rancangan Pembangunan Ekonomi Biru pasca *Covid-19* diarahkan untuk mengoptimalkan modalitas yang dimiliki Indonesia dari sektor kelautan sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman sumber daya kelautan, dan posisi Indonesia yang strategis secara politik dan ekonomi di kawasan. Pengelolaan sumber daya dan ekosistem kelautan juga diarahkan untuk dapat mengatasi tantangan degradasi pesisir dan sumber daya alam, perubahan iklim, dan polusi laut, serta kerentanan sosial ekonomi masyarakat pesisir yang terdampak perubahan kondisi ekosistem laut dan pesisir. Pengembangan ekonomi biru juga diharapkan dapat memperluas pemanfaatan peluang pengembangan aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi, seperti pariwisata berkualitas, pengembangan energi terbarukan, ekonomi sirkular, dan industri pengolahan berbasis sumber daya kelautan.

Penyusunan Rancangan Pembangunan *Sustainable Welfare* melalui sektor kelautan ini menerapkan pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif, mengingat ekonomi biru ini meliputi berbagai sektor dan lintas pelaku. Oleh sebab itu, pengembangan ekonomi biru membutuhkan sinergi antar aktor dan sektor untuk dapat menangani beberapa peluang dan

tantangan dalam mencapai keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. *Blue Economy* adalah konsep pembangunan yang berfokus pada nilai ekonomi sumber daya laut di Indonesia. Konsep ini dapat menciptakan nilai tambah pada rantai pasok (*supply chain*), secara langsung maupun tidak langsung. Tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Rancangan Pembangunan Ekonomi Biru ini merupakan penjabaran dari amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia (RPJPN) 2005-2025, khususnya mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat, maju, dan tangguh melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia (RPJMN) 2020-2024 yang menekankan pentingnya pengelolaan kelautan dengan baik untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan.

Rancangan Pembangunan Ekonomi Biru juga mendukung inisiatif global dalam pencapaian Agenda 2030 on *Sustainability Development Goals*, khususnya Tujuan 14: Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudra untuk Pembangunan Berkelanjutan serta mendukung Tujuan 7: Akses Energi yang Terjangkau, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua, Tujuan 8: Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua, Tujuan 9: Infrastruktur, Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Inovasi, dan Tujuan 17: Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Berdasarkan pada Konferensi Perubahan Iklim 2021 lalu (COP26), Indonesia dan Swedia sepakat sebagai negara kepulauan untuk sama-sama menerapkan *Blue Economy*. Maka, *Blue Economy* menjadi potensi ekonomi yang bisa digunakan untuk pemulihan dari pandemi *Covid-19*. Untuk transformasi ekonomi demi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, *Blue Economy* adalah salah satu kunci dengan yang perlu dioptimalkan. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 65 persen total luas negara Indonesia berupa laut. Swedia dan Indonesia memiliki banyak kesamaan peluang dan tantangan dalam mengembangkan *Blue Economy* sebagai dasar pembangunan ekonomi di masa depan. Swedia pun baru saja mengembangkan strategi ekonomi biru, melalui: *Strategi Blue-Growth* dan *Marine Spatial Planning*. Indonesia bersama dengan Swedia sudah sepakat untuk mengembangkan Peta Jalan untuk *Blue Economy*.

Menurut lembaga riset dari *United Nations University-WIDER* memperkirakan bahwa *Covid-19* dapat mengakibatkan angka kemiskinan global hingga mencapai 500 juta orang di seluruh penjuru dunia atau sekitar 8 persen dari total populasi umat manusia. Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan penurunan pendapatan dari unsur-unsur masyarakat tersebut akan menciptakan lapisan masyarakat yang sangat rentan terkena dampak virus ini, baik secara medis, ekonomi, maupun sosial. Jika situasi ini terus berlangsung, mereka yang tergolong kelas perekonomian menengah ke bawah kemungkinan merasa frustrasi yang kemudian akan terakumulasi menjadi kekecewaan (*grievance*) yang dapat meledak menjadi konflik sosial. (Yunus dan Rezki, 2020).

Pengelolaan sumber daya dan ekosistem kelautan juga diarahkan untuk bisa mengatasi tantangan degradasi pesisir dan sumber daya alam. Selain itu, perubahan iklim dan kerentanan sosial ekonomi masyarakat pesisir bisa diatasi juga. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjalankan pemulihan biru pasca pandemi *Covid-19* (*Blue Recovery*). Ekonomi biru juga merupakan ruang untuk menciptakan inovasi dan kreativitas baru. Transisi Indonesia ke ekonomi biru juga diharapkan menjadi model pengembangan industri berbasis kelautan yang berkelanjutan. Harapan pemerintah untuk menangkap berbagai investasi, tidak akan

mengabaikan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan. Indonesia telah berkomitmen melaksanakan seluruh 17 tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Tantangan terbesar bagi Indonesia dalam menerapkan ekonomi biru adalah perlu memahami potensi sumber daya perairan yang akan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Laju krisis iklim yang belum terkendalikan hingga penangkapan ikan yang dapat merusak, memberikan tekanan lebih tinggi terhadap kelangsungan hidup terumbu karang dan menjadi perhatian penting dalam hal penerapan ekonomi biru. Supaya, optimalisasi pengimplementasian kebijakan ekonomi biru pasca pandemi dapat berjalan dengan tepat serta tidak terkesan terlalu berpihak terhadap investasi pasca pandemi, dan ekonomi negara bisa lebih mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan peningkatan ekonomi rakyat, khususnya bagi masyarakat pesisir.

Penggunaan pendekatan Ekonomi Biru sebagai model pembangunan kelautan nasional diharapkan mampu menjawab ketergantungan antara ekonomi dan ekosistem serta dampak negatif akibat aktivitas ekonomi termasuk perubahan iklim dan pemanasan global. Keberhasilan dari Ekonomi Biru seperti pencapaian industrialisasi sektor kelautan selain dihadapkan pada kebutuhan tenaga kerja dan teknologi yang memadai, juga memerlukan terobosan-terobosan, seperti perbaikan rantai hulu hingga hilir guna meningkatkan daya saingnya.

Industrialisasi kelautan dalam konsep Ekonomi Biru didorong untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, modernisasi sistem produksi hulu dan hilir, penguatan pelaku industri, berbasis komoditas utama, wilayah dan sistem manajemen, pembangunan berkelanjutan serta transformasi sosial. Proses industrialisasi kelautan merupakan proses perubahan sistem produksi hulu hingga hilir untuk meningkatkan nilai tambah, produktivitas dan skala produksi sumberdaya kelautan melalui modernisasi yang didukung oleh kebijakan terintegrasi, pengembangan infrastruktur, sistem usaha dan investasi serta IPTEK dan SDM.

Salah satu dampak sederhana dari ekonomi biru ini yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat adalah memunculkan wirausahawan-wirausahawan baru di bidang perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mencontohkan sebuah industri ikan di Toba, Sumatra Utara. Produk ikan nila bukan hanya dikemas dengan mengolah dagingnya saja, tetapi sisa duri, kulit, dan lainnya dijadikan produk sektor lain. Menurutnya, Budi daya ikannya juga dilakukan dengan prinsip ekonomi biru.

Selain itu , masih banyak lagi penerapan ekonomi biru yang menghasilkan pendapatan bagi masyarakat, seperti dibukanya sektor-sektor wisata bahari di pulau-pulau kecil yang sebelumnya tidak terjamah karena terisolasi. Padahal disana mempunyai potensi untuk menghasilkan devisa bagi negara. Sehingga sejak adanya ekonomi biru ini, pembangunan-pembangunan dilakukan agar akses menuju tempat yang berpotensi untuk wisata semakin mudah.

Salah satu strategi menuju ekonomi biru antara lain adalah a) peningkatan pengelolaan aset laut dan pesisir (perikanan, mangrove, mangrove, terumbu karang) termasuk mengoptimalkan pengelolaan jasa sumber daya laut dan pesisir untuk wisata, b) Mobilisasi insentif dan investasi mengurangi sampah/limbah mengelola dampak lingkungan terhadap daerah pesisir, meningkatkan layanan dasar dan kualitas hidup masyarakat pesisir, serta melindungi destinasi wisata dari kerusakan, c) sistem yang lebih baik untuk pengumpulan dan pemantauan data. Perlunya sistem informasi terperinci dan tepat waktu bagi pengelolaan perikanan, ekosistem, dan dampak dari kegiatan manusia, ekosistem yang baik akan menguntungkan sektor perikanan, budaya serta pariwisata, d) Membangun kembali lebih biru setelah pandemi *Covid-19* aktivitas restorasi pesisir dan laut yang bersifat padat karya, seperti restorasi mangrove. Terumbu karang pembersihan pantai sangat membantu mewujudkan

ekonomi biru bagi masyarakat terdampak. Berikut adalah beberapa konsep terkait solusi dalam konteks *Blue Economy* untuk *recovery* pasca *Covid-19*.

2. Upaya atau Solusi *Blue Recovery*

a. *Blue Economy* di Sektor Perhubungan

Secara umum, arah strategi Pengembangan Ekonomi Sektor perhubungan laut adalah menyediakan pelayaran bagi masyarakat kepulauan yang aman, lancar, nyaman dan berwawasan lingkungan, serta membangun kekuatan armada transportasi nasional, menguasai pangsa pasar perhubungan laut nasional maupun internasional. mengoptimalkan kekuatan armada pelayaran nasional yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan. Mengembangkan Sistem *Monitoring, Controlling, and Surveillance* (MCS) keselamatan pelayaran yang efisien, efektif, dan hemat energi. Mengembangkan sistem manajemen transportasi laut nasional yang efisien dan terpadu dengan sistem transportasi darat dan udara.

Kemudian, untuk penjabaran dari arah strategi tersebut diperlukan upaya-upaya berupa implementasi bisnis sektor perhubungan laut yang dengan model Ekonomi Biru. Sektor perhubungan laut merupakan suatu aktifitas ekonomi yang sangat penting bagi negara kepulauan (*Archipelagic State*) seperti Indonesia. Jasa transportasi laut ini untuk melayani perpindahan barang dan penumpang dari satu pulau ke pulau lain (distribusi) sekaligus sebagai penggerak perekonomian masyarakat. Penerapan konsep Ekonomi Biru pada transportasi laut dapat diarahkan pada penetapan titik strategis pelabuhan utama maupun pelabuhan *feeder*, sehingga terbentuk sistem transportasi laut yang terintegrasi dengan menggunakan sumber daya yang efisien dan efektif. Pemilihan dan penggunaan energi yang bersifat *low carbon*, seperti kombinasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas, serta peluang untuk menggunakan energi terbarukan seperti angin, sinar matahari dan lain-lain dapat dikembangkan sebagai terobosan teknologi.

Contoh implementasi pengembangan bisnis sektor perhubungan laut dengan model Ekonomi Biru: rancangan alat transportasi laut dengan sistem instalasi yang mampu mengolah keluaran gas buang CO₂ menjadi nutrisi, *bio-fuel* dan *bio-plastic*, mengolah aliran arus air melalui terowongan di dalam kapal untuk generator listrik mini dan desalinasi air laut, penggunaan baling-baling yang mampu meningkatkan efisiensi propulsi kapal dan lain sebagainya.

2. *Blue Economy* di Sektor Industri Maritim

Strategi Pengembangan Ekonomi Sektor Industri Maritim diarahkan untuk membangun industri maritim yang tanpa limbah, efisien, kokoh, dan mandiri serta mampu memberikan *value added* yang tinggi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kelautan. Menciptakan industri maritim nasional yang hemat energi dan bersih (nir-limbah), mengembangkan kawasan industri maritim terpadu berbasis *ecoregion*, mengembangkan dan memperkuat industri bioteknologi kelautan yang ramah lingkungan dan berbasis inovasi.

Implementasi bisnis sektor industri maritim yang dengan model Ekonomi Biru pada hakekatnya memiliki cakupan yang luas dan terintegrasi dengan industri lain di daratan, seperti industri galangan kapal, mesin kapal, pengolahan minyak dan gas. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan industri maritim harus dipandang dalam perspektif holistik dan terpadu, artinya antara satu sektor dengan sektor lain yang memiliki keterkaitan. Dengan adanya pengembangan industri maritim, diharapkan akan terjadi proses transformasi sosial-ekonomi dalam masyarakat pesisir.

Tantangan pengembangan industri maritim saat ini adalah bagaimana menyelaraskan kebijakan pemerintah dan kepentingan kalangan pengusaha industri maritim dengan kebutuhan masyarakat yang bergerak dalam bidang kelautan. Dengan demikian ruang masyarakat (*civil sphere*) dan ruang pemerintah (*government sphere*) dapat harmonis sehingga kebijakan yang ditetapkan dapat mendorong terciptanya kesesuaian antara barang yang sehingga mampu membangkitkan aktivitas industri maritim kompetitif.

Implementasi bisnis di industri maritim dengan konsep Ekonomi Biru diantaranya adalah penggunaan berbagai bahan baku komponen kapal yang ramah lingkungan, pemanfaatan berbagai produk sampah (*waste material*) untuk penciptaan produk lainnya yang bermanfaat, penggunaan plat baja dan berbagai komponen berbahan baku logam dari material daur ulang logam, pemanfaatan sinar matahari (*solar cell*) sebagai sumber energi listrik, penggunaan alat pengolah limbah cair/oli, minyak dan lain-lain untuk menghasilkan oli daur ulang, penggunaan cat dan anti *fouling* yang tidak menghasilkan pencemaran pada lingkungan laut dan lain-lain.

3. *Blue Economy* di Sektor Perikanan

Pengembangan ekonomi Sektor Perikanan adalah dengan membangun sektor perikanan yang optimal, lestari, bernilai tambah, dan berdaya saing. Pembangunan bidang perikanan merupakan program revitalisasi ekonomi nasional, pembangunan ini diarahkan pada empat langkah utama yaitu (1) peningkatan kapasitas sumberdaya manusia perikanan dan penguatan lembaga pendukungnya, (2) pengamanan ketahanan pangan (*food security*) khususnya suplai protein yang berasal dari ikan, (3) peningkatan produktivitas, produksi dan daya saing produk perikanan, dan (4) peningkatan upaya diversifikasi produk perikanan dalam rangka meningkatkan nilai tambahnya. Mengoptimalkan dan memperkuat usaha dan industri perikanan yang efisien, produktif, ramah lingkungan, dan sesuai dengan standar internasional. Mengembangkan dan memperkuat usaha dan industri pengolahan hasil perikanan yang efisien, nir-limbah dan terpadu dengan perikanan tangkap dan budidaya. Mengembangkan sistem pemasaran dan manajemen usaha perikanan yang transparan, adil, dan menguntungkan semua pihak. Mengembangkan dan memperkuat usaha dan industri pengolahan hasil laut non-ikan yang efisien, nir-limbah, inovatif, kreatif, dan terpadu dengan sentra produksi

Kemudian, untuk penjabaran dari arah strategi tersebut diperlukan upaya-upaya implementasi bisnis sektor perikanan yang dengan model Ekonomi Biru. Implementasi bisnis pengembangan ekonomi Sektor perikanan dengan model Ekonomi Biru menggunakan teknologi alat tangkap ikan yang ramah lingkungan, dan mampu menjamin kualitas ikan hasil tangkapan, pengembangan instalasi pendingin yang menggunakan tekanan air laut sebagai penggerak, instalasi produksi es balok dengan bahan baku air laut, penggunaan teknologi inovatif penyediaan benih unggul yang mengembangkan spesies baru, penggunaan teknologi budidaya yang berbasis *trophic level*, sirkulasi limbah keluaran yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri lainnya, pengolahan rumput laut terpadu, mulai dari bahan baku hingga berbagai produk turunan lainnya seperti: untuk produk farmasetika, bahan makanan, dan lain sebagainya.

4. *Blue Economy* di Sektor Wisata Bahari

Wisata bahari merupakan salah satu sektor pembangunan kelautan Indonesia yang memiliki potensi besar, dengan banyaknya pulau-pulau yang dimiliki Indonesia dan belum dimanfaatkan secara optimal. Secara umum, arah strategi pengembangan ekonomi Sektor Wisata Bahari adalah mengembangkan wisata bahari Indonesia yang terpadu dan berwawasan lingkungan sehingga menjadi destinasi wisata dunia dan meningkatkan pengembangan wisata

nusantara yang mampu menjaga integritas budaya lokal, memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal serta dikelola secara berkelanjutan sehingga dapat mendatangkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Strategi pengembangan ekonomi Sektor wisata bahari di Indonesia dapat dicapai dengan mengembangkan industri pariwisata bahari berbasis ekosistem yang berkelas dunia, membangun sistem wisata bahari yang terpadu dengan sistem kepelabuhanan dan transportasi nasional, mengembangkan sistem pelayanan wisata bahari satu pintu (*Indonesia National single window*).

Untuk penjabaran strategi tersebut diperlukan implementasi bisnis sektor pariwisata bahari yang dengan mengeksplorasi keindahan alam laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang kemudian dikembangkan menjadi destinasi wisata potensial di Indonesia, seperti: Raja Ampat di Papua Barat, Bunakendi Sulawesi Utara, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Pulau Derawan di Kalimantan Timur dan lain-lain, dengan kekuatan utama pada keanekaragaman hayati, berbagai jenis ikan dan terumbu karang, keindahan alam bawah laut, pantai indah berpasir putih dan keramah-tamahan penduduk lokal. Wisata bahari merupakan rangkaian aktifitas terkait dengan *leisure activities*, seperti: olahraga selam, olahraga berselancar, olahraga pantai, serta wisata yang berbasis konservasi lingkungan laut, seperti: penanaman mangrove, transplantasi terumbu karang, dan lain-lain. Mengembangkan kawasan pemukiman pesisir yang ramah lingkungan, sistem pengelolaan limbah yang mampu menghasilkan keluaran sebagai sumber energi baru bagi kawasan (biogas), sistem desalinasi airlaut, penanaman mangrove yang sekaligus sebagai media hidup hayati laut.

5. *Blue Economy* di Sektor Jasa Kelautan

Pengembangan Jasa Kelautan secara umum diarahkan untuk membangkitkan kekuatan ekonomi nasional melalui peningkatan aktivitas ekonomi jasa kelautan untuk mendorong aktivitas ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (riset, pendidikan dan pelatihan kelautan), serta jasa kelautan lainnya dalam mendukung daya saing bidang kelautan nasional. Berkembangnya bidang kelautan sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi nasional memberi peluang bagi pengembangan ekonomi Sektor jasa kelautan seperti dukungan sumberdaya manusia, jasa pemasaran dan promosi, jasa penelitian kelautan, dan jasa pendidikan dan pelatihan. Sektor jasa kelautan mendukung pengembangan bidang kelautan secara menyeluruh dan terintegrasi. Sektor ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumberdaya pengelola pembangunan kelautan serta menyerap tenaga kerja lebih banyak. Untuk itu, perlu pendayagunaan potensi sektor jasa kelautan secara efektif dan efisien melalui pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan dan pengembangan industri jasa kelautan melalui kebijakan yang komprehensif dan kondusif sehingga peran sektor jasa kelautan nasional meningkat.

Implementasi pengembangan ekonomi sektor jasa kelautan yang dengan Model Ekonomi Biru adalah: penciptaan industri garam melalui kerjasama antaradunia usaha dengan perguruan tinggi atau lembaga riset untuk melakukan kerjasama dalam pengembangan riset dan inovasi guna menghasilkan produk garam dengan sistem produksi bersih (nir-limbah) dan bernilai tambah.

6. *Blue Economy* Lintas Sektor Bidang Kelautan

Secara umum, arah strategi pengembangan Lintas Sektor Bidang Kelautan adalah membangkitkan kekuatan ekonomi nasional melalui penguatan aktivitas yang menjadi landasan utama untuk memacu pertumbuhan ekonomi bidang kelautan. Berkembangnya aktivitas ekonomi bidang kelautan (7 sektor) sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi nasional tentu

memerlukan dukungan lingkungan dari berbagai aspek seperti: aspek keamanan, iklim investasi usaha, sistem fiskal dan moneter, dan infrastruktur dasar atau primer. Untuk mendukung hal ini pemerintah perlu menciptakan iklim investasi usaha di bidang kelautan yang kondusif dan efisien, menciptakan sistem fiskal dan moneter yang mendukung pengembangan usaha bidang kelautan yang dengan Model Ekonomi Biru, mengoptimalkan penyediaan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan usaha bidang kelautan yang dengan Model Ekonomi Biru. Implementasi pengembangan bisnis lintas sektor bidang kelautan adalah pemberian insentif (subsidi pajak atau pemberian modal) bagi pengembangan kawasan kelautan terpadu.

7. *Blue Economy* di Sektor Energi dan Sumberdaya Mineral

Strategi pengembangan ekonomi Sektor Energi dan Sumberdaya Mineral diarahkan pada peningkatan kemampuan nasional dalam memenuhi kebutuhan energi dan sumberdaya mineral kelautan melalui peningkatan produksi, yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran bangsa secara berkelanjutan. Kebijakan sektor energi yang tepat dan berpihak pada kepentingan nasional akan sangat mendukung kegiatan sektor-sektor ekonomi lainnya serta mampu menekan biaya sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas antar sektor. Langkah yang diperlukan untuk pengembangan ekonomi Sektor Energi dan Sumberdaya Mineral Kelautan adalah mengembangkan kapasitas nasional dalam pengelolaan energi dan sumberdayamineral kelautan yang berwawasan lingkungan, mengembangkan nilai tambah dan diversifikasi produk energi dan sumberdayamineral kelautan dan mengembangkan sumber energi terbarukan non-migas yang efisien dan ramahlingkungan.

Implementasi *blue economy* di sektor energi dan sumber daya mineral kelautan adalah penggunaan energi angin dan sinar matahari sebagai generator listrik *hybrid* untuk sumber energi di pulau-pulau kecil dan kawasan pesisir yang terpencil, penggunaan energi matahari untuk pengembangan instalasi desalinasi air laut sekaligus penghasil garam konsumsi, penggunaan rumput laut sebagai bahan bakar alternatif (bioetanol) dan lain-lain. Dengan ekonomi biru, Indonesia mampu menuai manfaat ekonomi dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan melestarikan ekosistem laut.

KESIMPULAN

Menerjemahkan ide-ide Ekonomi Biru (*Blue Economy*) ke masyarakat luas juga menjadi tantangan tersendiri. Pengimplementasian Ekonomi Biru untuk *recovery* perekonomian pasca *Covid-19* juga membutuhkan waktu agar dapat diterima dan dimengerti oleh masyarakat, pun dibutuhkan keterlibatan media massa dan pemerintah dalam menggerakkan berbagai sektor menuju konsep pembangunan ini. Meski masih ditanggapi oleh beragam keterbatasan dan permasalahan dalam masyarakat, namun sejauh ini Ekonomi Biru dipahami sebagai sebuah cara pengelolaan sumber daya alam yang mengutamakan efisiensi dan efektifitas dan juga salah satu cara untuk memperbaiki perekonomian pasca *Covid-19* sekaligus sebagai salah satu konsentrasi untuk pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan berkelanjutan. Selain itu, program ini harus segera disosialisasikan dan mulai diterapkan secepat mungkin Ekonomi Biru memiliki beberapa konsep, yakni kreativitas, inovasi, memanfaatkan sumber daya lokal, dan pemanfaatan material hingga tidak menyisakan limbah dalam upaya pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik di masa depan. Implementasi ekonomi biru di Indonesia banyak menghadapi sejumlah persoalan sehingga potensi yang diharapkan dari sektor perikanan dan kelautan tak dapat

dimanfaatkan dengan maksimal. Tanpa perbaikan dan kerja sama lintas kementerian, lembaga, serta pelibatan berbagai masyarakat sipil, target ekonomi biru berpotensi merusak sumber daya perikanan dan kelautan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2012). *Konsep Blue Economy Dan Peran Swasta*. http://kominfonewscenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2704:konsep-blue-economy-dan-peran-swasta&catid=38:ekonomi-dan-dunia-usaha&Itemid=37. [Diakses tanggal 27 oktober 2014].
- Anonim. (2013). *Pedoman Ekonomi Biru* http://www.terangi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=190%3A13-pedoman-ekonomibiru&catid=54%3Apengelolaan&Itemid=52&lang=id. Diakses tanggal 27 oktober 2014.
- Apriliansi, K. F. (2014). Analisis Potensi Lokal di Wilayah Pesisir Kabupaten Kendal dalam Upaya Mewujudkan Blue Economy. *Economics Development Analysis Journal*, 3(1).
- Bappenas. (2020). *Blue Economy Development Framework For Indonesias Economic Transformation*, Kementerian PPN/Bappenas
- Dewan kelautan Indonesia. (2012). *Kebijakan Ekonomi Kelautan dengan Model Ekonomi Biru*. Kementerian Kelautan dan Perikanan Sekretariat Jenderal Atuan Kerja Dewan kelautan indonesia.
- Fabianto, M. D. dan Berhutu, P. T. (2014). Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan yang Berbasis Masyarakat, *Jurnal Teknologi*, 11(2)
- Hakim, M.F. (2013). Blue Economy Daerah Pesisir Berbasis Kelautan dan Perikanan. *Economic Developmet Analysis Journal*. II (2)
- Hamzah, Z. (2014). *Ekonomi Biru Ciptakan Wirausahawan*. <http://www.republika.co.id/berita/koran/kreatipreneur/14/06/13/n73ck73-ekonomi-biru-ciptakan-wirausahawan>. Diakses tanggal 27 Oktober 2014.
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 146-153. <https://ummaspul.ejournal.id/Edupsycouns/article/view/423>
- Nurhayati, S. (2015). "Blue and Economy Policy" and Their Impact to Indonesian Community Welfare. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 37-42.
- Rani, F. dan Cahyasari, W. (2015). Motivasi Indonesia Dalam Menerapkan Model Kebijakan Blue Economy Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Transnasional*, 7(1).
- Raya, S. 2013. *Apa itu Ekonomi Biru*. <http://id.ekonomibiru.com>. Diakses tanggal 27 Oktober 2014.
- Sutradjo, S.C. (2012). *KKP Ajak Dunia Pendidikan Kembangkan Blue Economy*. <http://puskita.kkp.go.id/i2/index.php/siaran-pers/69-kkp-ajak-duniapendidikan-kembangkan-blueeconomy>. Diakses tanggal 11 Juli 2022.
- Tripon, A. (2014). Innovative Technology for Sustainable Development of Human Resource Using Nonformal and Informal Education. *Procedia Technology XII*, 598-603, Vol. 18, No. 1.